

Abstract

The debate over the special status of Yogyakarta privilege can not be separated from the context of the fight in the corridor interests of democracy and regional autonomy issues. Through the perspective of power attract such interest is evident. Reality is then interpreted by the newspapers as an interesting social facts to be reported to the public. This article describes the construction to local news media reported Yogyakarta in Yogyakarta in 2008 privilege issues.

Kata kunci :

Status khusus; demokrasi; otonomi daerah; konstruksi berita; media cetak lokal.

Intisari

Penelitian ini memiliki fokus perhatian pada konstruksi pemberitaan surat kabar. Kasus yang diambil adalah pemberitaan dua surat kabar daerah Yogyakarta, yaitu surat kabar *Kedaulatan Rakyat* dan surat kabar *Radar Jogja* mengenai isu keistimewaan Yogyakarta pada tahun 2008. Kasus tersebut pada dasarnya bersinggungan pada faktor kekuasaan pada level lokal. Surat kabar *Kedaulatan Rakyat* dan surat kabar *Radar Jogja* dipilih berdasarkan asumsi adanya pengaruh budaya dalam pemberitaan keistimewaan Yogyakarta. Surat kabar surat *Kedaulatan Rakyat* membawa representasi surat kabar Jawa dan surat kabar *Radar Jogja* menjadi representasi surat kabar Pesisiran. Surat kabar Jawa merupakan entitas surat kabar yang memiliki afiliasi pada kebudayaan Jawa. Budaya Jawa dalam hal ini diposisikan sebagai entitas budaya yang memiliki susunan hierarki kuat, sehingga institusi surat kabar diasumsikan terikat dalam pola hubungan yang disusun secara vertikal. Dalam konteks ini, relasi tersebut dipandang berpotensi mempengaruhi pola pembahasaan surat kabar melalui fakta linguistik yang berupa penggunaan tingkat-tingkat bahasa. Sedangkan surat kabar yang memiliki basis afiliasi kepada kultur pesisiran ditandai dengan adanya kebebasan tertentu dan mendukung terbentuknya konsep individu.¹ Dalam pandangan Koentjaraningrat (1994) penduduk di daerah pesisir memiliki sistem kepercayaan lebih puritan yang kemudian mempengaruhi kehidupan sosial budayanya.² Pada tataran ini, surat kabar yang diasumsikan sebagai surat kabar pesisiran akan terikat oleh sistem nilai budaya melalui penggunaan bahasa lugas dan pola interaksi egaliter. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *dialectical relational approach* dari Norman Fairclough melalui model analisis tiga tingkat (*text analysis, discourse practise dan sociocultural practise*). Hasil penelitian memperlihatkan adanya perbedaan frame dalam melihat realitas keistimewaan Yogyakarta. Surat kabar *Kedaulatan Rakyat* mengkonstruksi berita keistimewaan Yogyakarta dalam bentuk penetapan gubernur dan wakil gubernur. Sedangkan surat kabar *Radar Jogja* membungkus realitas keistimewaan Yogyakarta dalam isu pemilihan gubernur dan wakil gubernur secara demokratis. Namun begitu, asumsi yang dibangun terhadap surat kabar *Kedaulatan Rakyat* sebagai surat kabar representasi Jawa memiliki korelasi dengan hasil penelitian. Sebagai surat kabar representasi Jawa, berita yang disusun oleh *Kedaulatan Rakyat* adalah berita yang dibentuk dengan bahasa lunak. Terlebih ketika berita tersebut menyentuh institusi keraton atau tokoh elit di Yogyakarta. Secara teoritis realitas ini dapat dijelaskan melalui falsafah kejawaan *Kedaulatan Rakyat* yang memposisikan institusi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah sistem sosial. Dalam konteks ini relasi raja-kawula, pejabat tinggi-warga, yang dipertuan-vasal, patron-klien dan senior-yunior menjadi lumrah dan secara tidak langsung mempengaruhi substansi berita. Sementara

¹Lombard, Denys, 2008, *Nusa Jawa: silang Budaya Warisan Kerajaan-Kerajaan Konsentris*, Gramedia Pustaka Utama-Forum Jakarta Paris, hal : 58

²Koentjaraningrat, 1994, *Kebudayaan Jawa*, Balai Pustaka, Jakarta, hal : 26



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Surat kabar daerah dan kekuasaan (critical discourse analysis berita keistimewaan Yogyakarta di surat kabar Kedaulatan Rakyat dan surat kabar Radar Jogja tahun 2008
SUKARNO, Adam Wijoyo, Drs. Kuskridho Ambardi, M.A., PhD
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

asumsi yang dibangun terhadap surat kabar *Radar Jogja* tidak sepenuhnya terbukti. Hal ini berhubungan pada fakta kebijakan redaksional yang mengarahkan reporter mengambil perspektif berbeda dengan surat kabar lain. Namun begitu, berita yang ditulis dengan bahasa lugas, tegas dan menempatkan surat kabar pada posisi egaliter identik dengan ciri budaya non-jawa yang tidak mengenal tingkatan bahasa dan strata sosial.

Kata kunci :
Status khusus, demokrasi, otonomi daerah, konstruksi berita,
Surat kabar lokal